

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*. Amandemen ke-IV.

_____. *Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*, UU No 2 Tahun 2011. Lembar Negara Nomor 8. Tambahan Lembar Negara Nomor 5189.

_____. *Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*, UU No 2 Tahun 2008. Lembar Negara Nomor 2. Tambahan Lembar Negara Nomor 4801.

_____. *Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara*, UU No. 39 Tahun 2008. Lembar Negara Nomor 166. Tambahan Lembar Negara Nomor 4916.

_____. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik*. Permenkumham No. 34 Tahun 2017.

B. Buku

Asrun, A. Muhammad. *Hukum Acara Sengketa Pemilu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Depok: Rajawali Pers. 2020.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

_____. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers. 2020.

Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

- Azhari, M. Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- _____. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia, 1981.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2016.
- Efriza dan Jerry Indrawan. *Pengantar Politik: Sebuah Telaah Emporik dan Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2019.
- Gaffar, Afan. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kusnardi, Moh. dan Ibrahim, Harmaily. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti, 1983.
- M.D., Moh, Mahfud. *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia, Studi Tentang Integrasi Politik Dalam Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- MD, Moh Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sahid, Kamarudin. *Memahami Sosiologi Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sjamsuddin, Nazuruddin. Zukifli Hamid, dan Toto Pribadi, *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Karunika Universitas Terbuka, 1988.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. *Politik Hukum, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi: Aktualisasi Konstitusi dalam Praksis Kenegaraan*. Malang: Setara Press, 2013.
- Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar, 1962.

C. Lain-lain

- Aditya, Nicholas Ryan. Bapilu: Tak Ada KLB di Demokrat, jika Ada Itu Ilegal. Tersedia di: <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/05/10215931/bapilu-tak-ada-klb-di-demokrat-jika-ada-itu-ilegal?page=all>. Diakses tanggal 20 Januari 2022.
- Administrator. "Sejarah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia". Tersedia di: <https://www.kemenkumham.go.id/profil/sejarah>. Diakses tanggal 12 Desember 2021.
- Dahlan, Doni Muhammad. "Peningkatan Peran Politik di Indonesia: Sebuah Paradigma Baru Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik". *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*.
- Dzulfaroh, Ahmad Naufal. "Perpecahan Partai Demokrat dan Catatan Buruk dalam Perpolitikan Indonesia". Tersedia di: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/06/205000465/perpecahan-partai-demokrat-dan-catatan-buruk-dalam-perpolitikan-indonesia?page=all>. Diakses tanggal 10 Desember 2021.
- Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. "Sukseski dan Masa Depan Demokrasi". *Majalah Keadilan*. Nomor 3 Tahun XVI-1990.
- Hendartyo, Muhammad. "Kubu KLB Klaim Kongres Demokrat Sah dan Akan Dihadiri 1.200 Orang". Tersedia di: <https://nasional.tempo.co/read/1438930/kubu-klb-klaim-kongres-demokrat-sah-dan-akan-dihadiri-1-200-orang/full&view=ok>. Diakses tanggal 10 Desember 2021.
- Humas, Biro. Pemerintah Resmi Tolak KLB Demokrat Deli Serdang. Tersedia di: <https://www.kemenkumham.go.id/berita/kemenkumham-resmi-tolak-klb-demokrat-deli-serdang>. Diakses tanggal 20 Januari 2022.
- Hutomo, Dimas. Pendaftaran Partai Politik untuk Menjadi Badan Hukum. Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pendaftaran-partai-politik-untuk-menjadi-badan-hukum-lt5c15aa3878724>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2022.
- ID, KBBI Lektor. "2 Arti Kepengurusan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)". Tersedia di: <https://kbbi.lector.id/kepengurusan>. Diakses tanggal 12 Desember 2021.

Kemenkumham RI, DITJENPP. Paradigma baru UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Tersedia di: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/508-paradigma-baru-uu-no-2-tahun-2008-tentang-partai-politik.html>. Diakses pada tanggal 13 Februari 2022.

_____, DITJENPP. Sistem Multi Partai, Presidensial Dan Persoalan Efektivitas Pemerintah. Tersedia di: https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=438:sistem-multi-partai-presidensial-dan-persoalan-efektivitas-pemerintah&catid=100&Itemid=180. Diakses tanggal 2 Februari 2022.

Kemenkumham, "Sejarah Kementerian Hukum dan HAM". Tersedia di: <https://www.kemenkumham.go.id/attachments/article/1402/sejarah-kemenkumham.pdf>. Diakses tanggal 10 Januari 2022.

M Hadjon, Philipus. Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Dsingkat UUAP). *Varia Peradilan* No. 358. (September 2015).

Mulachela, Husen. Memahami Partai Politik, Pengertian, Fungsi dan Sistemnya. Tersedia di: <https://katadata.co.id/agung/berita/624c0dd3d51b9/memahami-partai-politik-pengertian-fungsi-dan-sistemnya>. Diakses pada tanggal 1 Februari 2022.

Online, KBBI. "Kamus Besar Bahasa Indonesia - Ubah". Tersedia di: <https://kbbi.web.id/ubah>. Diakses tanggal 12 Desember 2021.

Permana, Tri Cahya Indra. Model penyelesaian Perselisihan Partrai Politik Secara Internal Maupun Eksternal. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Volume 5, Nomer 1. Maret 2016.

Putri, Budiarti Utami. Sederet Fakta KLB Demokrat Deli Serdang yang Tetapkan Moeldoko Jadi Ketum. Tersedia di: <https://nasional.tempo.co/read/1439362/sederet-fakta-klb-demokrat-deli-serdang-yang-tetapkan-moeldoko-jadi-ketum/full&view=ok>. Diakses tanggal 20 Januari 2022.

Umam, Chaerul. "Yasonna Laoly Ungkap Kepengurusan Demokrat Hasil KLB Deli Serdang Telah Diajukan ke Kemenkumham". Tersedia di: <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/16/yasonna-laoly-ungkap-kepengurusan-demokrat-hasil-klb-deli-serdang-telah-diajukan-ke-kemenkumham>. Diakses tanggal 10 Desember 2021.

Yami, Meri. "Undang-Undang Parpol dalam Perubahan Paradigma Pelaksanaan Fungsi Parpol Guna Mengukur Perpolitikan". *Jurnal Inovatif*. Vol. 4, No. 5, Tahun 2012.